

## BAB 11

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Studi Pustaka

Sebagai acuan dalam mengkaji, membahas dan memperjelas masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka diperlukan beberapa teori dari pendapat beberapa ahli sarjana untuk dijadikan perbandingan mengenai kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. Penelitian mengenai Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu antara lain :

Dalam penelitian Wardatul Asryah (2012)<sup>1</sup>, dengan judul “Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Usaha Tambak di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Jawa Tengah”. Menemukan bahwa strategi peningkatan kesejahteraan Ekonomi Masyarakat diarahkan untuk mendorong pengembangan struktur yaitu dengan memperkuat kedudukan dan peran ekonomi masyarakat dalam perekonomian nasional. Perubahan ini meliputi proses perubahan dari ekonomi lemah ke ekonomi yang tangguh, dari ketergantungan ke kemandirian, perubahan struktur ini mensyaratkan langkah-langkah dasar yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan dan penguasaan teknologi.

---

<sup>1</sup>Dalam Skripsi Wardatul Asryah, Dengan Judul Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Tambak Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Jawa Tengah, Jurusan pengembangan masyarakat islam, , 2012, Hal. 95-96.

Penelitian Agustinus Dala Nitu (2011)<sup>2</sup> dengan judul “ Studi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Program Pengembangan Usaha Mandiri Mitra Binaan di Kelurahan Buraen Kecamatan Amarasi Selatan Kabupaten Kupang”. Salah satu program bantuan yang diberikan pemerintah pusat khususnya untuk wilayah Kelurahan adalah Program Pemberdayaan Ekonomi (PER) yang bertujuan untuk mengatasi berbagai kesulitan kehidupan (kemiskinan) yang terjadi di seluruh Indonesia. Dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat melalui Program Pengembangan Usaha Mitra Mandiri Binaan Pihan Pemerintah kelurahan bersama tenaga pendamping maupun masyarakat anggota kelompok usaha mempunyai tugas dan kewenangan yang sangat besar dalam mensukseskan jalannya program bantuan yang diberikan Pemerintah tersebut. wujud dari program pemberdayaan ekonomi rakyat yang dilakukan melalui pengembangan Kapasitas ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha mandiri. Dalam hal ini Pemerintah berperan sebagai Fasilitator dan Motivator, untuk dapat menyukseskan program pemberdayaan yang diberikan sehingga dapat mengatasi kemiskinan yang ada pada masyarakat khususnya pada wilayah kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa studi pemberdayaan ekonomi rakyat melalui program pengembangan usaha mandiri mitra binaan di Kelurahan Buraen Kecamatan Amarasi Selatan Kabupaten Kupang secara umum sudah berjalan dengan baik. hal ini terlihat jelas pada hasil penelitian dari ketiga indikator yang diteliti oleh Penulis yaitu :

---

<sup>2</sup>Dalam skripsi Agustinus Dala Nitu, Studi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Program Pengembangan Usaha Mitra Binaan di Kelurahan Buraen Kecamatan Amarasi Selatan Kabupaten Kupang, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, jurusan Ilmu Pemerintahan, 2011.

menciptakan iklim yang kondusif, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat dan memberdayakan rakyat. Dari indikator ini dapat dilihat bahwa dalam menjalankan Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat melalui pengembangan usaha mandiri mitra binaan. Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan, Tenaga Pendamping maupun kelompok Masyarakat itu sendiri sudah cukup baik. hanya saja perlu ditingkatkan lagi guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Peran Aparat Pemerintah Kelurahan Buraen serta Tenaga Pendamping Kelompok terhadap peningkatan kerja dan penyediaan sarana prasarana sebagai penunjang keberhasilan anggota kelompok usaha mandiri mitra binaan sudah cukup baik. hal tersebut membuat masyarakat senang terutama dengan tersedianya sarana dan prasarana oleh pemerintah, tetapi bantuan yang di berikan khususnya pada bidang pertanian dan peternakan anggota kelompok usaha mandiri mitra binaan masih kesulitan dalam mengembangkan program pemberdayaan yang diberikan pemerintah karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat. Dalam pemberdayaan rakyat motivasi yang diberikan masyarakat sendiri sudah sangat baik yaitu dilihat dari peran yang diberikan oleh pihak pemerintah serta tenaga pendamping terhadap jalannya program pemberdayaan masyarakat. Hanya saja lebih difokuskan pada apa yang benar-benar dibutuhkan oleh anggota kelompok masyarakat sendiri sehingga semua faktor yang dapat mempengaruhi program pengembangan usaha mandiri mitra binaan ini dibuat agar dapat merubah kehidupan serta keadaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Buraen menjadi lebih sejatera.

Berdasarkan kedua hasil penelitian terdahulu tersebut, maka hal yang menjadi kesamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang kesejahteraan masyarakat. Sedangkan yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini dengan dua peneliti lainnya oleh Wardatul Asryah dan Agustinus Dala Nitu adalah : Wardatul Asryah meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat namun tidak ada lembaga maupun dari pihak pemerintah yang bekerja sama dengan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kemudian Agustinus Dala Nitu melakukan studi pemberdayaan ekonomi rakyat melalui program pengembangan usaha mandiri mitra binaan di Kelurahan Buraen Kecamatan Amarasi Selatan Kabupaten Kupang. Salah satu program yang diberikan pemerintah pusat khususnya untuk wilayah Kelurahan adalah Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PER) yang bertujuan untuk mengatasi berbagai kesulitan kehidupan (kemiskinan) yang terjadi di seluruh Indonesia. Sedangkan yang menjadi perbedaan dalam penelitian yang peneliti lakukan ini melihat bagaimana Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut di Desa Kenebibi Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu.

## **2.2 Pengelolaan Sumber Daya Laut**

### **2.2.1. Pengertian Pengelolaan**

Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Selanjutnya Adisasmita mengemukakan bahwa “pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien<sup>3</sup>.”

Berdasarkan pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi merencanakan, mengorganisasikan dan mengarahkan, dan mengawasi kegiatan manusia dengan memanfaatkan material dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien .

#### 2.2.2. Konsep Sumber Daya Laut

Sumber Daya Laut merupakan sumber daya yang meliputi, ruang lingkup yang luas yang mencakup kehidupan laut ( flora dan fauna, mulai dari organisme mikroskopis hingga paus pembunuh dan habitat laut) mulai dari perairan dalam sampai ke daerah pasang surut di pantai dataran tinggi dan daerah muara yang luas. Berbagai orang memanfaatkan dan berinteraksi dengan lingkungan laut mulai dari pelaut, nelayan komersial, pemanen kerang, ilmuwan dan lain-lain. Dan digunakan

---

<sup>3</sup>Adisasmita Rahardjo, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah.GrahaIlmu , Yogyakarta, 2011. Hal. 211-213.

untuk berbagai kegiatan baik rekreasi, penelitian industri dan kegiatan lain yang bersifat komersial.

Laut memiliki banyak fungsi / peran / manfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya karena di dalam dan di atas laut terdapat kekayaan sumber daya alam yang dapat kita manfaatkan diantaranya yaitu :

1. Tempat rekreasi dan hiburan
2. Tempat hidup sumber makanan kita
3. Pembangkit listrik tenaga ombak, pasang surut, angin, dsb.
4. Tempat budidaya ikan, kerang mutiara, rumput laun, dll.
5. Tempat barang tambang berada
6. Salah satu sumber air minum (desalinasi)
7. Sebagai jalur transportasi air
8. Sebagai tempat cadangan air bumi
9. Tempat membuang sampah berbahaya (fungsi buruk)
10. Sebagai objek riset penelitian dan pendidikan.

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil dilaksanakan dengan tujuan<sup>4</sup>:

- a. Melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan.

---

<sup>4</sup>Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007.

- b. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- c. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan, serta
- d. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta proses alami secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>5</sup>.

Pengelolaan Pesisir Terpadu adalah suatu proses pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan jasa lingkungan yang mengintegrasikan antara kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, perencanaan horizontal dan vertikal ekosistem darat dan laut, sains dan manajemen sehingga pengelolaan sumberdaya tersebut berkelanjutan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup>Pasal 5 Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007

<sup>6</sup>Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.10/MEN/2002

## 2.3 Konsep Strategi Pemberdayaan Masyarakat

### 2.3.1. Pengertian Strategi

Apabila ditinjau dari segi etimologi, Strategi berasal dari bahasa Yunani yakni “strato” yang artinya pasukan dan “agenis-agenis” yang berarti memimpin<sup>7</sup>.

Strategi pada mulanya berasal dari peristiwa peperangan yaitu sebagai suatu siasat untuk mengalahkan lawan. Sehingga strategi diidentik dengan peperangan<sup>8</sup>. Bahwa strategi dapat diartikan sebagai siasat perang atau ilmu siasat. Akan tetapi pada perkembangan selanjutnya, istilah strategi tidak hanya dipergunakan dalam bidang peperangan atau militer saja melainkan semakin berkembang sehingga merambat ke berbagai bidang. Seperti bidang ekonomi, bidang politik, bidang komunikasi sehingga banyak ditemui istilah-istilah seperti strategi ekonomi, strategi politik, strategi komunikasi dan lain-lain.

### 2.3.2. Manajemen Strategi

Manajemen strategi memberikan pengaruh terhadap jalannya organisasi dan bagaimana kontribusinya terhadap keberhasilan dan kegagalan perusahaan. Kehadiran manajemen strategi dalam khasanah ilmu manajemen merupakan isu penting yang berorientasi pada kepentingan jangka panjang dengan memperhatikan berbagai unsur yang dimiliki oleh organisasi. Manajemen strategi adalah cara yang

---

<sup>7</sup>Dalam Skripsi Wardatul Asryah, Dengan Judul Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Tambak Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Jawa Tengah, Jurusan pengembangan masyarakat Islam, 2012. Hal 11.

<sup>8</sup>[www.KBBI.co.id/Arti](http://www.KBBI.co.id/Arti) Kata Strategi, 17 Mei 2017, 19.34.



akan dilakukan para penyusun strategi menentukan tujuan dan membuat keputusan strategik sehingga tujuan dan sasarannya tercapai<sup>9</sup>.

Penerapan strategi meliputi kebijakan organisasi, memotivasi pegawai, dan mengalokasikan sumber daya (SDM dan Non SDM) agar strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan. Sedangkan evaluasi strategi meliputi upaya-upaya yang dilakukan untuk memonitor seluruh hasil dari pembuatan dan penerapan termasuk mengukur kinerja organisasi serta mengambil langkah koreksi bila diperlukan. Selanjutnya, dalam proses manajemen strategi ini, peneliti hanya berfokus pada penerapan strategi. Karena, strategi dalam penelitian ini mengarah pada komponen-komponen yang ada dalam proses pelaksanaan strategi.

### 2.3.3. Evaluasi Strategi

Pada saat melakukan evaluasi strategi, perlu direnungkan bersama bahwa pada dasarnya tidak terdapat satu pun tolak ukur absolut untuk menilai apakah sebuah strategi yang telah direalisasikan itu sudah baik atau mungkin belum baik. Setiap strategi tak lain adalah persepsi spesifik dari suatu tim manajemen mengenai bagaimana cara terbaik yang akan ditempuh untuk menghadapi kendala-kendala yang telah diantisipasi. Walaupun demikian ada beberapa ciri tertentu yang dapat menjadi indikator terhadap efektifitas dari suatu strategi<sup>10</sup>. ciri-ciri tersebut dapat dirinci menjadi empat kriteria menyeluruh, menyangkut :

---

<sup>9</sup>Akdon, Manajemen Strategik Untuk Manajemen Pendidikan, Bandung : Cv Alfabeta, 2006, Hal 7-10.

<sup>10</sup>Airnee Heene, Manajemen Strategik Keorganisasian Publik. Bandung : PT Refika Additama, 2010, Hal 226.

- a. Konsistensi. Suatu strategi tidak diperkenankan sedikit pun untuk merumuskan berbagai perencanaan sasaran maupun langkah-langkah operasional yang serba inkonsisten.
- b. Penyesuaian diri. Suatu strategi harus senantiasa memberikan respons adaptif atas munculnya kendala-kendala dari lingkungan internal maupun eksternal organisasi.
- c. Penciptaan nilai. Suatu strategi harus senantiasa meracik jalan keluar konseptual positif yang mendorong upaya penciptaan nilai yang seoptimal mungkin.
- d. Potensi diri. Suatu strategi harus senantiasa tidak diperkenankan menilai secara berlebihan terhadap sarana-sarana yang tersedia ataupun merekayasa kreasi-kreasi baru yang justru sulit ditangani.

Seperti juga proses pengawasan pada umumnya, proses evaluasi dan kontrol strategi dimulai dari menentukan apa yang harus diukur, menetapkan standar kinerja, melakukan pengukuran, dan bila tidak sesuai dengan harapan, kita melakukan tindakan koreksi.

## 2.4 Filosofi dan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

### 2.4.1. Filosofi Pemberdayaan Masyarakat

Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat oleh Mardikanto diartikan sebagai<sup>11</sup>:

---

<sup>11</sup>Mardikanto, Pembangunan Berbasis masyarakat, Alfabeta:Bandung, 2015, .hal145.

“Proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua stakehoders (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri dan partisipatif yang semakin sejatera secara berkelanjutan”.

Rumusan lain yang lebih tua nampaknya paling banyak dikemukakan oleh banyak pihak dalam banyak kesempatan adalah yang dikutip *kelsey* dan *hearne* (1955) yang menyatakan bahwa filosofi pemberdayaan harus berpijak kepada pentingnya pengembangan individu di dalam perjalanan pertumbuhan masyarakat dan bangsanya. Karena itu, ia mengemukakan bahwa : filosofi pemberdayaan adalah : *bekerjasama masyarakat* untuk membantunya agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia (*helping people to help themselves*).

Berkaitan dengan filosofi “*helping people to help themselves*” Ellerman (2001) mencatat adanya delapan peneliti yang menelusuri teori pemberian bantuan, yaitu :

1. Hubungan Penasehat dan Aparat Birokrasi (Albert Hirschman), melalui proses pembelajaran tentang: ide-ide baru, analisis keadaan dan masalahnya yang diikuti dengan tawaran solusi dan minimalisasi konfrontasi/ketegangan yang terjadi :antara aparat pemerintah dan masyarakat, antara sesama aparat, dan

antara kelompok-kelompok masyarakat yang merasa dirugikan yang menikmati keuntungan dari kebijakan pemerintah.

2. Hubungan guru dan murid (John Dewey), dengan memberikan :
  - a. Kesempatan untuk mengenali pengalamannya,
  - b. Stimulasi untuk berpikir dan menemukan masalahnya sendiri,
  - c. memberikan kesempatan untuk melakukan “penelitian”,
  - d. Tawaran solusi untuk dipelajari,
  - e. Kesempatan untuk menguji idenya dengan aplikasi langsung.
3. Hubungan manajer dengan karyawan ( Douglas McGregor), melalui pemberian tanggungjawab sebagai alat kontrol diri.
4. Hubungan dokter dan pasien (Carl Rogers), melalui pemberian saran yang konstruktif dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki dan atau diusahakannya sendiri.

Ujicoba kegiatan melalui pemberian dana manajemen dari luar, ternyata tidak akan memberikan hasil yang lebih baik.
5. Hubungan guru spritual dan murid ( Soren Kierkagaard), melalui pemahaman bahwa masalah atau kesalahan hanya dapat diketahui oleh yang mengalaminya ( diri sendiri).
6. Hubungan organisator dan masyarakat ( Saul Alinsky), melalui upaya demokratis, menumbuh kembangkan partisipasi, dan mengembangkan keyakinan (rasa percaya diri) untuk memecahkan masalahnya sendiri.

7. Hubungan pendidikan dan masyarakat ( Paul Freire), melalui proses penyadaran dan memberikan kebebasan untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik menurut dirinya sendiri.
8. Hubungan agen pembangunan dengan lembaga lokal (E.F. Schumacher), melalui program bantuan untuk mencermati apa yang dilakukan seseorang atau masyarakat dan membantu agar mereka dapat melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan.

#### **2.4.2. Lingkup Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat**

Dalam pengertian yang diberikan terhadap pemberdayaan, jelas dinyatakan bahwa pemberdayaan adalah proses pemberian atau optimasi daya ( yang dimiliki dan atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat), baik daya dalam pengertian “ kemampuan dan keberanian “ maupun daya dalam arti “ kekuasaan atau posisi- tawar”.

Dalam praktik pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh banyak pihak, seringkali terbatas pada pemberdayaan ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan atau penanggulangan kemiskinan. Karena itu kegiatan pemberdayaan masyarakat selalu dilakukan dalam bentuk pengembangan kegiatan produktifitas untuk peningkatan pendapatan ( *income generating*). Terhadap rumusan ini, mardikanto menambahkan pentingnya kelembagaan karena proses pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya merupakan proses pengembangan kapasitas, yaitu

pengembangan kapasitas manusia, kapasitas usaha, kapasitas lingkungan dan kapasitas kelembagaan.

Lebih lanjut Mardikanto menguraikan sebagai berikut :<sup>12</sup>.

#### 1. Pengembangan Kapasitas Manusia

Pengembangan kapasitas manusia, merupakan upaya yang pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan masyarakat. Di samping itu, dalam ilmu manajemen, manusia menempati unsur yang paling unik. Termasuk dalam upaya pengembangan kapasitas manusia , adalah semua manusia kegiatan yang termasuk dalam upaya penguatan/pengembangan kapasitas yaitu :

- a. Pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kapasitas kepribadian, kapasitas di dunia kerja dan pengembangan keprofesionalan.
- b. Pengembangan kapasitas Entitas/kelembagaan, yang meliputi :
  1. Kejelasan visi, misi, dan budaya organisasi
  2. Kejelasan struktur organisasi, kompetensi, dan strategi organisasional.
  3. Proses organisasi atau pengelola organisasi
  4. Pengembangan jumlah dan mutu sumberdaya
  5. Interaksi antar individu di dalam organisasi
  6. Interaksi dengan entitas organisasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang lain.

---

<sup>12</sup>Ibid. hal 154

- c. Pengembangan kapasitas sistem (*jejaring*) yang meliputi :
  - a. Pengembangan interaksi antar entitas (organisasi) dalam sistem yang sama
  - b. Pengembangan interaksi dengan entitas /organisasi di luar sistem

## 2. Pengembangan Kapasitas Usaha

Pengembangan kapasitas usaha menjadi suatu upaya penting dalam setiap pemberdayaan, sebab, pengembangan kapasitas manusia yang tanpa memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi dan atau ekonomi ) tidak akan laku, dan bahkan menambah kekecewaan.

Pengembangan kapasitas usaha mencakup :

- a. Pemilihan komoditas dan jenis usaha
- b. Studi kelayakan dan perencanaan bisnis
- c. Pembentukan badan usaha
- d. Pengembangan jejaring dan kemitraan
- e. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung.

## 3. Pengembangan Kapasitas Lingkungan

Pengembangan Kapasitas Lingkungan, sangat diperlukan karena pengembangan kapasitas usaha yang tidak terkendali dapat menjurus pada ketamakan atau kerakusan yang dapat merusak lingkungan (baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya).

Kesadaran seperti itulah yang mendorong diterbitkannya Undang – undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang – undang

No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan yang didalamnya mencantumkan tanggungjawab sosial dan lingkungan oleh penanam modal/perseroan. Di lingkungan internasional, sejak 2007 telah ditetapkan ISO 26000 tentang tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

#### 4. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

Pergertian tentang kelembagaan, seringkali dimaknai dalam arti sempit sebagai beragam bentuk lembaga (kelompok, organisasi). Tetapi kelembagaan sebenarnya memiliki arti yang luas. Hayami dan Kikuchi (1981) mengartikan kelembagaan sebagai salah satu perangkat umum yang ditaati oleh anggota suatu komunitas (masyarakat). Dalam kehidupan sehari – hari, kelembagaan yang merupakan terjemahan dari kata ‘*institution*’ adalah suatu konsep yang tergolong membingungkan dan dapat dikatakan belum memperoleh pengertian yang mantap dalam ilmu sosiologi.

Kata kelembagaan. Sering dikaitkan dengan dua pengertian, yaitu “*social institution*” atau pranata – sosial dan ‘*social organization*’: atau organisasi sosial. Adapun itu, pada prinsipnya, suatu bentuk realisasi – sosial dapat disebut sebagai sebuah kelembagaan apabila memiliki empat komponen, yaitu adanya:

- a. *Komponen person*. Di mana orang – orang yang terlibat di dalam suatu kelembagaan dapat identifikasi dengan jelas.



- b. *Komponen kepentingan*, di mana orang – orang tersebut pasti sedang diikat oleh suatu kepentingan atau tujuan, sehingga di antara mereka terpaksa harus saling berinteraksi.
- c. *Komponen aturan*, di mana setiap kelembagaan mengembangkan seperangkat kesepakatan yang dipegang secara bersama, sehingga seseorang dapat menduga apa perilaku orang lain dalam lembaga tersebut.
- d. *Komponen struktur*, di mana setiap orang memiliki posisi dan peran, yang harus dijalankannya secara benar. Orang tidak bisa merubah posisinya dengan kemauan sendiri.

Lebih lanjut, dari beragam pengertian yang diberikan, kelembagaan memiliki ciri – ciri:

- a. Kelembagaan berkenaan dengan sesuatu yang permanen. Ia menjadi permanen, karena dipandang rasional disadari kebutuhannya dalam kehidupan.
- b. Kelembagaan, berkaitan dengan hal – hal yang abstrak yang menentukan perilaku. Sesuatu yang abstrak tersebut merupakan suatu kompleks dari beberapa hal yang sesungguhnya terdiri dari beberapa bentuk yang tidak sepadan. (*selevel*).
- c. Hal yang abstrak ini kira – kira sama dengan *public mind*, atau ‘wujud ideal kebudayaan’.

- d. Berkaitan dengan perilaku, atau seperangkap *mores* (tata kelakuan), atau cara bertindak yang mantap yang berjalan di masyarakat (*establish way of behaving*). Perilaku yang terpolo merupakan kunci keteraturan hidup.
- e. Kelembagaan juga menekankan kepada pola perilaku yang disetujui dan memiliki sanksi.
- f. Kelembagaan merupakan cara – cara yang standar untuk memecahkan masalah. Tekananya adalah pada kemampuannya untuk memecahkan masalah.

#### 2.4.3. Pemberdayaan Sebagai Proses Penguatan Kapasitas

Peran yang dimainkan oleh pemberdayaan pada hakikatnya adalah untuk memperkuat daya ( kemampuan dan posisi-tawar) agar masyarakat semakin mandiri. Karena itu pemberdayaan diartikan sebagai proses penguatan kapasitas<sup>13</sup>.

Penguatan kapasitas adalah proses peningkatan kemampuan individu, kelompok, organisasi dan kelembagaan yang lain untuk memahami dan melaksanakan pembangunan dalam arti luas secara berkelanjutan.

Dalam pengertian tersebut terkandung pemahaman bahwa :

1. yang dimaksud dengan kapasitas adalah kemampuan ( individu, kelompok, organisasi dan kelembagaan yang lain) untuk menunjukkan/memerankan fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

---

<sup>13</sup>Ibid. hal 131-136.

2. Kapasitas bukanlah sesuatu yang pasif, melainkan proses yang berkelanjutan.
3. Pengembangan kapasitas sumberdaya manusia merupakan pusat pengembangan kapasitas.
4. Yang dimaksud dengan kelembagaan, tidak terbatas dalam arti sempit (kelompok, perkumpulan, atau organisasi), tetapi juga dalam arti luas, menyangkut perilaku nilai-nilai,dll.

Sejalan dengan pemahaman tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat, strategi pembangunan yang memberikan perhatian perhatian lebih banyak ( dengan mempersiapkan ) lapisan masyarakat yang masih tertinggal dan hidup di luar atau di pinggiran jalur kehidupan modern.

Terkait dengan upaya penguatan kapasitas masyarakat yang dilakukan, keberhasilan proses yang dilakukan, keberhasilan proses dalam pemberdayaan masyarakat bukan merupakan keberhasilan pengelola atau fasilitator program, melainkan harus diakui oleh masyarakat sebagai keberhasilan usaha mereka sendiri.

Kekuatan atau daya yang dimiliki setiap individu dan masyarakat bukan dalam arti pasif tetapi bersifat aktif yaitu terus menerus dikembangkan/dikuatkan untuk “memproduksi” atau menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat.

Penguatan masyarakat disini, memiliki makna ganda yang bersifat timbal balik. Di satu pihak, penguatan diarahkan untuk lebih memampukan individu

agar lebih mampu berperan dalam kelompok dan masyarakat global, di tengah-tengah ancaman yang dihadapi baik dalam kehidupan pribadi, kelompok dan masyarakat global.

Sebaliknya, penguatan masyarakat diarahkan untuk melihat peluang yang berkembang di lingkungan kelompok dan masyarakat global agar dapat dimanfaatkan bagi perbaikan kehidupan pribadi, kelompok dan masyarakat global.

Lebih lanjut Mardikanto menguraikan sebagai berikut :

a. Penguatan kapasitas individu

Pengembangan kapasitas individu adalah segala upaya untuk memperbaiki atau mutu karakteristik pribadi agar lebih efektif dan efisien, baik dalam entitasnya maupun dalam lingkup global. Pengembangan kapasitas pribadi meliputi kapasitas kepribadian, kapasitas di dunia kerja dan pengembangan keprofesionalan.

1. Pengembangan kapasitas kepribadian meliputi :

- a. Penampilan fisik merujuk kepada tingkah laku, tata busana, tata rias, gaya-bicara.
- b. Nilai-nilai prilaku, merujuk kepada kebiasaan, norma, dan etika pergaulan lainnya baik yang dipelihara di dalam sistem sosial tertentu maupun dalam pergaulan yang lebih luas dengan individu-individu

yang berasal dari sistem sosial yang berbeda latar belakang budayanya.

- c. Keterampilan berkomunikasi, yang meliputi gaya bicara, bahasa lisan maupun bahasa tubuh, penggunaan media/perlengkapan berkomunikasi yang selalu harus di sesuaikan dengan karakteristik penerima/komunikasi, serta waktu dan tempatnya.

2. Pengembangan kapasitas di dunia kerja meliputi :

- a. Kapasitas untuk memasuki dunia kerja meliputi : persyaratan kerja yang meliputi : pengetahuan teknis, sikap kewirausahaan, dan keterampilan manajerial yang diperoleh melalui pendidikan/pelatihan serta motivasi bekerja.
- b. Kapasitas untuk melakukan pekerjaan yang diperolehnya melalui pelatihan dll.
- c. Kapasitas untuk pengembangan karir, yang mencakup : budaya kerja, ketrampilan berkomunikasi, hubungan interpersonal, bekerja dalam tim, saling ketergantungan, serta pengembangan jejaring dan perilaku profesional.

3. Pengembangan kapasitas keprofesionalan

Kapasitas keprofesionalan, adalah segala bentuk perilaku yang sangat diperlukan bagi pengembangan karir dan yang meliputi : pengetahuan teknis, sikap kewirausahaan dan keterampilan manajerial sedang integritas profesional adalah satu bentuk loyalitas terhadap profesi yang biasanya

terlihat dalam : kebanggaan profesi, pengembangan keahlian dan kecintaan terhadap pekerjaannya.

b. Penguatan kapasitas kelembagaan

Kapasitas entitas/organisasi tersebut, meliputi :

1. Kejelasan visi, misi, dan budaya organisasi
2. Kejelasan struktur organisasi dan strategi yang akan ditempuh untuk tercapainya tujuan/efektifitas organisasi
3. Proses organisasi/pengelolaan organisasi meliputi : perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pembiayaan, dan pengendalian.
4. Pengembangan jumlah dan mutu sumber daya yang mencakup : sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya informasi maupun sarana dan prasarana.
5. Interaksi individu dalam organisasi.

c. Penguatan kapasitas sistem ( jejaring)

Terkait dengan hal itu, pengembangan kapasitas sistem meliputi :

1. Pengembangan interaksi antar entitas ( organisasi) dalam sistem yang sama, yang terdiri dari :
  - a. Organisasi perilaku
  - b. Organisasi pemerintah
  - c. Organisasi lembaga bisnis
  - d. Organisasi profesi
  - e. Organisasi kemasyarakatan

- f. Organisasi Non-pemerintah
  - g. Organisasi minat, dll.
2. Interaksi dengan entitas/organisasi di luar sistem, yang terdiri dari :
- a. Organisasi sosial-politik
  - b. Organisasi pemerintahan
  - c. Organisasi ekonomi
  - d. Organisasi teknologi
  - e. Organisasi fisik/lingkungan, dll.

Penyelenggaraan Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan suatu tujuan utama dari mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu dengan melihat dan memahami akar persoalan yang terjadi, maka Sulistiyani, mengemukakan beberapa strategi pemberdayaan masyarakat nelayan antara lain<sup>14</sup> :

a) Individu

Strategi ini dilakukan kepada setiap individu yang terlibat dalam sebuah organisasi masyarakat atau kelompok usaha bersama melalui bimbingan, pendidikan dan pelatihan yang terprogram. Tujuan utama adalah untuk menguatkan kapasitas individu-individu agar menguasai keahlian tertentu sehingga dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kemajuan kelompok.

---

<sup>14</sup>Ambar Tegus Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Alfabeta.2004. Hal 83-84.

b) Kelembagaan

Kelembagaan merupakan suatu proses membentuk organisasi masyarakat terkait struktur komunitas atau lembaga melalui pendidikan atau pelatihan, yang diarahkan untuk menguatkan kapasitas kerja sama

(team work) melalui pelatihan yang terprogram sehingga dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya membangun visi dan komitmen bersama-sama serta mampu memecahkan masalah yang di hadapi secara bersama juga.

c) Jaringan Kerja

Merupakan suatu proses untuk memperluas usaha ke berbagai elemen masyarakat, oleh karena itu penting untuk menyiapkan jaringan berupa forum komunikasi kelompok dan juga kontrak kerja sama antara kelompok usaha dengan Pemerintah Desa.

d) Sarana dan prasarana

Meliputi hal-hal penunjang yang berkaitan dengan pengelolaan suatu program dalam hal ini menyangkut alat-alat yang diperlukan dalam pengelolaan sumber daya laut.

e) Keuangan

Merupakan hal penting dan umumnya di perlukan dalam melancarkan semua akses organisasi atau kelompok. Oleh karena itu perlu disiapkan sejak awal dan terencana sehingga tidak kendala waktu kegiatan berjalan.



